

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM KEWASPADAAN
PANGAN DAN GIZI (SKPG) DI KABUPATEN BANTUL**

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh

**Mira Sisca Kadarsih
NIM. 10417141023**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) DI KABUPATEN BANTUL

Oleh:

Mira Sisca Kadarsih dan Drs. Argo Pambudi, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul.

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Mendeskripsikan fenomena yang diteliti, yakni efektivitas pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul. Subjek penelitiannya adalah orang-orang yang terlibat dalam Pokja/Tim SKPG di Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif, dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul telah efektif dengan mencapai tujuan yang dirumuskan berupa tersedianya informasi pangan dan gizi bulanan maupun tahunan untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan. Kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Bantul cenderung aman. Hanya enam desa yang mengalami rawan pangan pada tahun 2013. Akan tetapi penyebaran informasi pangan dan gizi masih sangat terbatas pada SKPD yang berpartisipasi langsung dalam SKPG Kabupaten Bantul. ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah anggota Pokja SKPG di Kabupaten Bantul. Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya pemanfaatan informasi pangan dan gizi yang dihasilkan SKPG untuk mengantisipasi secara lebih menyeluruh kejadian rawan pangan.

Kata Kunci: efektivitas pelaksanaan, SKPG, rawan pangan

A. PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu hak asasi individu dan komponen dasar untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemerintah memiliki tanggungjawab besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjamin terciptanya kesejahteraan bagi setiap warga negara. Terpenuhinya kebutuhan pangan tidak hanya dilihat dari kuantitas pangan yang cukup. Tetapi juga harus memperhatikan kualitas, keragaman, keamanan, dari pangan itu sendiri. Kondisi rawan pangan terjadi apabila kebutuhan pangan tidak dapat terpenuhi. Kondisi rawan pangan menjadi salah satu dari masalah

pangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dijelaskan bahwa masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan merupakan kebijakan turunan dari Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Melalui kebijakan Ketahanan Pangan, pemerintah menegaskan perlunya peran dari seluruh sektor baik pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan salah satu kebijakan pelaksana dari kebijakan Ketahanan Pangan. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya masalah pangan dengan cara memantau situasi pangan dan gizi. SKPG merupakan serangkaian proses meliputi pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi.

Berdasarkan data BPS tahun 2012, pada tahun 2011 masih terdapat 42,08 juta penduduk atau sekitar 17,41% dari seluruh penduduk di Indonesia mengalami kondisi sangat rawan pangan. Data BPS tahun 2013 menunjukkan persentase angka rawan pangan pada tahun 2012 mencapai sekitar 19,46% atau 47,64 juta penduduk dari seluruh penduduk di Indonesia mengalami kondisi sangat rawan pangan. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,56 juta penduduk. Berdasarkan data Global Food Security Index 2012, yang dirilis Economic Intelligent Unit, indeks keamanan pangan Indonesia berada di bawah 50 (0-100). Posisi Indonesia jauh lebih buruk dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina.

Kondisi rawan pangan disebabkan oleh banyak faktor. Rawan pangan kronis disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada waktu yang lama karena keterbatasan ekonomi. Rawan pangan transien disebabkan oleh faktor alam seperti kekeringan, banjir, hama, paceklik, cuaca ekstrim, gempa bumi,

dan sebagainya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya. Rawan pangan transien bersifat mendadak dan sementara.

Pemantauan kondisi rawan pangan dan gizi sangat diperlukan untuk melihat tingkat kerawanan pangan dan gizi. Sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan maupun penanggulangan kerawanan pangan. Salah satu cara untuk memantau kondisi pangan dan gizi dapat dilakukan melalui SKPG. SKPG dilaksanakan oleh kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui pokja/tim SKPG yang dibentuk oleh pemerintah di masing-masing tingkatannya. Dari serangkaian proses dalam SKPG dihasilkan Peta Rawan Pangan yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan berbagai intervensi. Intervensi tersebut berupa kebijakan ataupun program untuk mengatasi masalah krisis pangan atau untuk acuan pengelolaan pangan dan gizi dalam jangka panjang.

Peta Rawan Pangan dibuat dengan menganalisis tiga aspek, yakni: aspek ketersediaan pangan, aspek akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Aspek ketersediaan pangan mengacu pada jumlah produksi pertanian yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan pangan baik secara bulanan maupun tahunan. Aspek akses pangan mengacu pada jumlah rumah tangga miskin. Aspek pemanfaatan pangan mengacu pada jumlah balita dengan gizi buruk di suatu wilayah. Untuk memvisualisasikan tingkat rawan pangan suatu wilayah digunakan tiga warna yakni: warna hijau untuk wilayah dengan kondisi aman pangan, warna kuning untuk kondisi waspada, dan warna merah untuk kondisi terindikasi rawan pangan. Keefektifan Peta Rawan Pangan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan suatu wilayah akan dipengaruhi oleh efektivitas dari pelaksanaan SKPG.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang rentan terhadap kejadian rawan pangan terutama rawan pangan transien. Hal ini karena Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana mulai banjir, angin kencang dan tanah longsor (www.kr.co.id/bantul-siaga-darurat-bencana, diakses 24 Februari 2014 pukul 09.19 WIB). Peran SKPG sangat

penting untuk memberikan informasi bagi pemerintah Kabupaten Bantul terkait dengan kondisi pangan dan gizi, sehingga tindakan penanggulangan rawan pangan dapat tepat sasaran.

Berdasar pada Peta Rawan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2012, dari 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul terdapat 10 desa dengan tingkat resiko rawan pangan dan gizi yang tinggi. Kesepuluh desa tersebut yakni Desa Banguntapan, Desa Singosaren, Desa Jagalan, Desa Bangunjiwo, Desa Tirtonirmolo, Desa Tamantirto, Desa Ngestiharjo, Desa Guwosari, Desa Argosari, dan Desa Srihardono. Terjadinya kerawanan pangan dan gizi umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya jumlah hasil produksi pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di wilayah tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Harsono dkk (2013), ditemukan bahwa terdapat desa dengan kondisi tidak rawan pangan akan tetapi memperoleh bantuan dana untuk ketahanan pangan dalam Program Desa Mandiri Pangan. Desa tersebut yakni Desa Bawuran Kecamatan Pleret. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, seberapa berpengaruh SKPG terhadap penentuan lokasi program-program pemberdayaan desa-desa yang rawan pangan.

SKPG dilaksanakan sebagai langkah antisipasi dan penanggulangan kerawanan pangan di Kabupaten Bantul. SKPG harusnya mampu menjadi pedoman agar pemerataan dan peningkatan ketahanan pangan dapat dilakukan. Berdasarkan pada paparan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana efektivitas pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul dalam menyediakan informasi kondisi rawan pangan dan gizi. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah mengenai efektivitas pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

William Dunn (2003: 132) menjelaskan kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Thomas R. Dye yang dikutip oleh Riant Nugroho (2012:120) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat dan di implementasikan oleh pemerintah dari berbagai alternatif pilihan yang ada untuk bertindak atau tidak bertindak sebagai upaya merespon masalah sosial yang ada sehingga tercapai tujuan yang dicitakan.

Implementasi/pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah disahkannya suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Riant Nugroho (2012:674) membagi langkah pelaksanaan kebijakan publik menjadi dua pilihan, yaitu kebijakan langsung dilaksanakan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada saat ini bukan termasuk dalam sebuah program yang langsung diturunkan dari sebuah kebijakan (undang-undang). Terdapat dua kebijakan di atasnya yakni UU No. 7 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik

Soewarno Handyaningrat (1990: 16) mengutip Definisi efektivitas yang dikemukakan H. Emerson, yang menyebutkan bahwa efektivitas ialah pengukuran terhadap tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Riant (2012: 707-710) mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.

- a. Tepat kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- b. Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
- d. Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses. Yaitu Policy Acceptance, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Policy adoption, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Strategic Readiness, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan serangkaian proses pemantauan terhadap kondisi pangan dan gizi untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi, yang selanjutnya dilakukan intervensi atau tindakan. Pelaksanaan SKPG saat ini mengacu pada Permentan No. 43 Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG. Dalam peraturan disebutkan tiga indikator yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Ketiga indikator tersebut yakni indikator ketersediaan pangan, indikator akses pangan dan indikator pemanfaatan pangan.

Indikator ketersediaan pangan berkaitan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan, maupun bantuan pangan (Hanani, 2009). Indikator distribusi/aksesibilitas pangan berkaitan dengan kemampuan rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian atau melalui bantuan pangan (Hanani, 2009). Indikator pemanfaatan pangan mengacu pada penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektivitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita (Riely et.al, 1999 dalam Hanani, 2009).

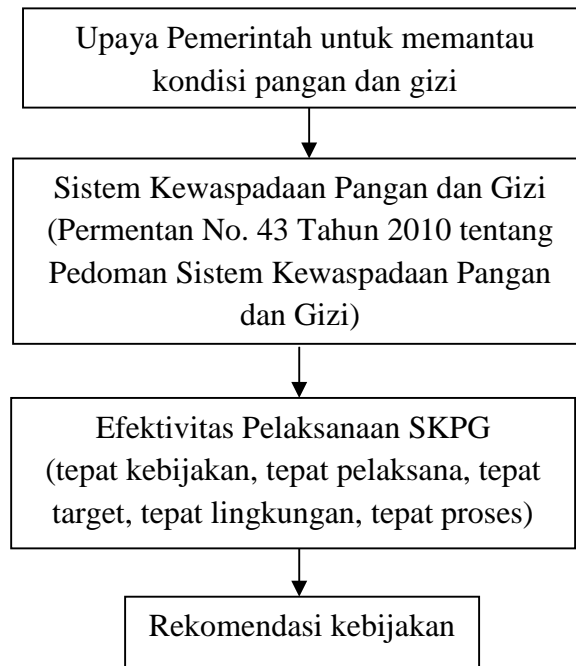
Penelitian Relevan

- a. Dwi Harsono dkk, (2013) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Desa Bawuran, Kecamatan Pleret dan Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu)”. Penelitian tersebut relevan sebagai rekomendasi penelitian ini, karena penelitian Dwi Harsono dkk, pengamatan difokuskan pada program Desa Mandiri Pangan untuk menciptakan ketahanan pangan.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menfokuskan pada pelaksanaan SKPG untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul.

- b. Yusuf Reynald Goetena Lamabelawa (2006) dalam tesis yang berjudul “Analisis Kinerja Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur”. Penelitian tersebut relevan sebagai rekomendasi penelitian ini karena keduanya sama-sama melakukan pengamatan pada SKPG. Namun dalam penelitian Yusuf pengamatan SKPG dilakukan pada kinerja tim SKPG di Kabupaten Lembata, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menfokuskan untuk mengamati pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul.
- c. Toto Suharto dan Laksono Trisnantoro (2006) dalam Jurnal yang berjudul “Koordinasi Lintas Sektor Pada Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Di Kabupaten Sleman”. Penelitian tersebut relevan sebagai rekomendasi penelitian ini karenasama-sama mengamati SKPG. Namun dalam penelitian Toto dan Laksono, pengamatan SKPG difokuskan pada koordinasi antar lembaga dalam menjalankan SKPG di Kabupaten Sleman. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mefokuskan pada proses pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul.

Kerangka Berfikir



Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana ketepatan kebijakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan?
- b. Bagaimana ketepatan pelaksana kebijakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi?
- c. Bagaimana ketepatan target kebijakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi?
- d. Bagaimana ketepatan lingkungan kebijakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi?
- e. Bagaimana ketepatan proses kebijakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi?

C. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif. Digunakan metode kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami lebih mendalam dan mendeskripsikan terkait

efektivitas pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten, sehingga data yang dikumpulkan berupa data deskriptif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bantul. Beberapa SKPD tersebut antara lain Bappeda, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, dan Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Penelitian ini dilakukan mulai 15 Maret 2014 sampai dengan 31 Mei 2014.

Subjek Penelitian

Pemilihan subjek/informan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam terkait dengan topik penelitian. Informan penelitian ini merupakan orang-orang yang masuk dalam Pokja SKPG Kabupaten Bantul. Informan tersebut yakni:

1. Informan 1 : Ibu Ir. Suryanti, MMA
Jabatan : Staf Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul, Ketua Pokja SKPG Kabupaten Bantul.
2. Informan 2 : Ibu Desiana Triwahyuni, STP
Jabatan : Staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, anggota Pokja SKPG Kabupaten Bantul
3. Informan 3 : Ibu Anastasia Eni Rahayuningsih, S.Gz
Jabatan : Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, sekretaris Pokja SKPG Kabupaten Bantul.
4. Informan 4 : Ibu Ir. Erni Kumarawati, MM,
Jabatan : Staf Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Anggota Pokja SKPG Kabupaten Bantul.
5. Informan 5 : Bapak Saptono Iman Budi Santoso, SKM. M.Kes,
Jabatan : Staf Bappeda Kabupaten Bantul, Anggota Pokja SKPG

Kabupaten Bantul.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian ialah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan sebagai pengumpul data penelitian dengan bantuan beberapa alat pendukung seperti buku, dokumen, pedoman wawancara, dll. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen penelitian meliputi pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif dan penguasaan wawasan terhadap objek yang diteliti, yakni: kebijakan publik, efektivitas implementasi/pelaksanaan kebijakan publik, dan SKPG. Kisi-kisi instrumen penelitian dibuat untuk memudahkan peneliti untuk membuat pedoman wawancara:

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Fenomena yang diamati	Dimensi	Indikator
Efektivitas pelaksanaan Kebijakan	Ketepatan kebijakan	Muatan kebijakan terhadap masalah yang hendak dipecahkan
	Ketepatan pelaksana	Ketepatan instansi pelaksana Ketepatan SDM pelaksana
	Ketepatan target	Target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Tumpang tindih dengan intervensi lain.
	Ketepatan lingkungan	Lingkungan internal kebijakan. Lingkungan eksternal kebijakan.
	Ketepatan Proses	<i>Policy acceptance</i> <i>Policy adoption</i> <i>Strategic Readiness</i>

Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer: Data primer diambil dari sumber data secara langsung berupa keterangan atau penjelasan dari subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada subjek/informan penelitian yang memahami topik penelitian dan melalui observasi langsung di lapangan terkait dengan topik efektivitas pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

2. Data Sekunder: Data sekunder digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan peneliti melalui wawancara dan observasi langsung. Data sekunder yang digunakan dapat berupa jurnal, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, laporan kegiatan, artikel media massa, arsip, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur (structured interview) dan wawancara tak berstruktur (unstructured interview). sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam peneliti mengajukan pertanyaan diluar dari pedoman wawancara, namun masih berhubungan dengan topik penelitian.

2. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung untuk mengamati aktivitas implementasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Bantul. Peneliti menggunakan pedoman observasi untuk memudahkan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan SKPG.

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, laporan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dan berbagai dokumen lain yang mendukung.

Teknik Analisis Data

Merunut pada teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles & Huberman, 2009: 16).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kegiatan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga penganalisis dapat melihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis (Miles & Huberman, 2009: 17-18).

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiono, 2012: 253). Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga makna-makna yang muncul dapat teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya (Miles & Huberman, 2009: 19).

Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan teknik yang sama (Sugiono, 2012:274). Informasi yang diperoleh dari seorang narasumber dikonfirmasi dengan beberapa narasumber lain yang dinilai memahami masalah/topik penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) diatur dalam Permentan No. 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur monitoring kondisi pangan dan gizi. Tujuan diadakannya monitoring kondisi pangan dan gizi ialah untuk memperoleh informasi pangan dan gizi, untuk pencegahan dan penanganan kerawanan pangan. Dalam pelaksanaan SKPG ini terdapat dua aktor utama, yakni: (1) Kementerian Pertanian sebagai pembuat kebijakan, dan (2) Pokja SKPG mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten sebagai aktor pelaksanaan kebijakan.

Terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan SKPG yakni: (1) tahap pembentukan pokja SKPG. Pokja SKPG terdiri dari perwakilan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, serta Bappeda Kabupaten Bantul. (2) tahap pengumpulan dan analisis data, data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan data yang berkaitan dengan indikator penilaian SKPG. Data produksi pertanian serealialia dan jumlah penduduk untuk indikator ketersediaan pangan, data jumlah balita gizi buruk untuk indikator pemanfaatan pangan, data KK KS-1 dan Pra KS untuk indikator ketersediaan pangan. (3) tahap investigasi, investigasi dilakukan untuk melihat kedalaman masalah rawan pangan, penyebab rawan pangan dan jenis intervensi yang dibutuhkan. (4) tahap intervensi, tindakan-

tindakan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi rawan pangan. (5) tahap pelaporan, laporan berisi kondisi pangan dan gizi masing-masing indikator dan komposit dari ketiga indikator.

Dibentuknya SKPG oleh Kementerian Pertanian bertujuan untuk memberikan standar indikator dan penilaian pemantauan kondisi pangan dan gizi. Dari serangkaian proses SKPG dihasilkan informasi kondisi pangan dan gizi yang menjadi bahan rekomendasi untuk pencegahan dan penanganan rawan pangan. Efektivitas pelaksanaan SKPG dilihat dengan adanya informasi kondisi pangan dan gizi mampu meminilisir kejadian rawan pangan di Kabupaten Bantul.

Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul dilakukan untuk menilai apakah dari pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul telah berhasil mencapai tujuan dari dibentuknya SKPG. Efektivitas implementasi/pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Riant Nugroho (2012: 707) menyebutkan lima tepat yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan. Kelima tepat tersebut yakni:

1. Tepat Kebijakan

Permentan No. 43 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi mengatur tentang tata cara pelaksanaan SKPG mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten. SKPG dibentuk oleh Kementerian Pertanian sebagai sebuah sistem untuk memantau dan menyediakan informasi kondisi pangan dan gizi. Pedoman SKPG memuat standar indikator dan penilaian SKPG, agar pelaksanaan SKPG dapat berjalan dengan baik dan merata disetiap daerah. terdapat tiga indikator yang digunakan dalam SKPG yakni indikator ketersediaan pangan, indikator aksesibilitas pangan dan indikator pemanfaatan pangan. Standar penilaian ditetapkan dalam ketiga indikator tersebut untuk penentuan daerah rawan pangan dan daerah aman pangan.

Pembentukan Pedoman SKPG dirasa telah sesuai dengan sasaran kebijakan itu sendiri berupa pemantauan dan penyediaan informasi kondisi

pangan dan gizi. Namun. Indikator ketersediaan pangan yang ada saat ini belum mampu menggambarkan secara nyata kondisi kerawanan pangan, terutama untuk desa-desa urban dengan lahan pertanian yang sempit. Dengan menggunakan indikator tersebut desa-desa urban akan selalu berstatus rawan pangan (merah), padahal kondisi dilapangan belum tentu menunjukkan adanya kerawanan pangan di daerah tersebut.

Pokja SKPG Kabupaten Bantul telah berupaya agar ada penyesuaian indikator ketersediaan pangan dengan mengajukan peninjauan kembali kepada Kementerian Pertanian. Namun hingga saat ini belum ada respon dan wacana untuk mengubah atau melakukan penyesuaian pada indikator tersebut. Pokja SKPG Kabupaten Bantul juga tidak dapat melakukan penyesuaian atau perubahan indikator. Hal ini karena SKPG merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya sebatas pelaksana. Dengan belum adanya penyesuaian indikator ketersediaan pangan Pokja SKPG Kabupaten Bantul terpaksa menggunakan indikator ketersediaan pangan yang berlaku saat ini. Hal ini tentu saja berdampak pada desa-desa di Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan merupakan daerah urban. Desa-desa tersebut yakni Desa Banguntapan, Desa Jagalan, Desa Tirtonirmolo, dan Desa Ngestiharjo. Dampak dari penggunaan indikator ketersediaan yang ada saat ini ialah keempat desa tersebut akan selalu berstatus rawan pangan setiap tahunnya, meskipun kondisi masyarakat yang senyatanya sangat jauh dari rawan pangan.

Dengan dilaksanakannya SKPG di Kabupaten Bantul, kondisi pangan dan gizi menjadi lebih terpantau secara berkala. Dengan adanya informasi pangan dan gizi ini membantu pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan antisipasi kejadian rawan pangan. Dari pantauan kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Bantul pada tahun 2011, 2012, dan 2013 diketahui kondisi pangan dan gizi cenderung stabil. Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat sepuluh desa yang berstatus rawan pangan, sedangkan pada tahun 2013 hanya enam desa yang berstatus rawan pangan, terjadi

penurunan jumlah desa yang berstatus rawan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul mampu mengantisipasi kejadian rawan pangan melalui SKPG dan juga berbagai macam program lain untuk mengantisipasi rawan pangan, seperti program desa mandiri pangan, program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), serta program pemberdayaan lainnya.

2. Tepat Pelaksana

Kebijakan SKPG merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul dilakukan oleh Pokja SKPG yang dibentuk oleh Kepala BKPPP Kabupaten Bantul. Masyarakat hanya menjadi objek yang didata, dari data tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui kondisi pangan dan gizi masyarakat. SKPG merupakan program lintas sektor sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu SKPD, melainkan lima SKPD yang berkenaan langsung dengan masalah pangan dan gizi.

Pokja SKPG beranggotakan satu perwakilan beberapa SKPD di Kabupaten Bantul. Dilihat dari sisi kuantitas sumberdaya manusia, jumlah anggota Pokja SKPG Kabupaten Bantul saat ini, yang hanya berjumlah 6 orang tidak sesuai dengan jumlah yang ada dalam Pedoman SKPG yang terdiri dari 15 orang. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana untuk membiayai Pokja SKPG. Kekurangan jumlah personil dari Pokja SKPG ini tidak menghambat pelaksanaan SKPG untuk menyediakan informasi pangan dan gizi. Akan tetapi keterbatasan sumberdaya manusia tersebut menyebabkan kurang meluasnya penyebaran informasi SKPG ke SKPD lain. Dan data yang masuk untuk dianalisis dalam SKPG hanya sebatas data-data pokok saja.

Dilihat dari segi kualitasnya, kemampuan dari anggota Pokja SKPG telah sesuai dengan kebutuhan SKPG untuk menjalankan SKPG dengan baik. Anggota yang terlibat dalam Pokja SKPG merupakan orang-orang yang paham betul dan menangani langsung data yang dibutuhkan dalam

analisis SKPG. Pemahaman akan pentingnya informasi kondisi pangan dan gizi mendorong Pokja SKPG Kabupaten Bantul untuk sebisa mungkin melaksanakan SKPG dengan baik. Meskipun kegiatan SKPG bukan merupakan tugas utama dari para anggota Pokja SKPG, namun pelaksanaan SKPG juga diutamakan.

3. Tepat Target

Sesuai dengan Pedoman SKPG, target dari SKPG ini ialah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan SKPG. Dalam pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul, BKPPP Kabupaten Bantul sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul. BKPPP Kabupaten Bantul menjadi leading sector dalam pelaksanaan SKPG. Saat ini SKPG menjadi satu-satunya sistem yang digunakan di Kabupaten Bantul untuk memantau dan menghasilkan informasi pangan dan gizi. Sejatinya SKPG bukanlah hal baru dalam pemantauan rawan pangan dan gizi. Pada tahun 1979 konsep pemantauan rawan pangan dan gizi mulai di uji cobakan di beberapa daerah yakni di Kabupaten Lombok Tengan, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Boyolali dengan dukungan dari USAID dan Cornell University Amerika Serikat. Tahun 1996 sistem pemantauan rawan pangan dan gizi mulai diterapkan di seluruh Indonesia dengan nama Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI). SIDI maupun SKPG keduanya memiliki fungsi utama untuk memantau dan menyediakan informasi pangan dan gizi, hanya namanya saja yang berbeda. Namun tujuan utama keduanya sama yakni memantau dan menyediakan informasi kondisi pangan dan gizi untuk mengantisipasi rawan pangan.

4. Tepat Lingkungan

Dukungan lingkungan kebijakan dapat dilihat dari interaksi antara BKPPP dalam menjadi leading sector SKPG dengan organisasi perumus kebijakan yakni Bappeda dan Kementerian Pertanian, dengan organisasi SKPD lain, dan dengan BKPP tingkat provinsi. Berdasarkan wawancara,

interaksi baik antara perumus kebijakan, organisasi SKPD lain, dan BKPP provinsi telah berjalan dengan baik. Interaksi antara BKPPP dengan perumus kebijakan ialah berupa masuknya anggaran SKPG dalam RAPBD Kabupaten Bantul. Interaksi dengan Kementerian Pertanian berupa sosialisai SKPG dan koordinasi pelaksanaan SKPG dalam skala nasional. interaksi antara BKPPP dengan SKPD lain ialah dalam bentuk rekomendasi berdasarkan hasil analisis SKPG berupa informasi kondisi pangan dan gizi. Dan interaksi antara BKPPP kabupaten dengan BKPPP provinsi dilihat dari adanya koordinsi untuk melakukan sinkronisasi antara SKPG pusat, SKPG Provinsi, dan SKPG kabupaten.

Lingkungan eksternal kebijakan dilihat dari persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan SKPG. dalam pelaksanaan SKPG masyarakat hanya menjadi objek yang didata. Masyarakat tidak terlibat secara langsung, namun masyarakat juga memberikan dukungan yang cukup besar agar SKPG dapat berlangsung. Dukungan masyarakat berupa kemauan untuk didata sehingga proses pendataan dapat berjalan dengan lancar. Dari data tersebutlah kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh informasi kondisi pangan dan gizi.

5. Tepat Proses

Kementerian Pertanian membentuk Pedoman SKPG melalui Permentan No. 43 tahun 2010. Kementerian Pertanian memahami perlunya suatu sistem untuk memantau kondisi pangan dan gizi secara berkala. Sistem dibuat untuk menghasilkan informasi kondisi pangan dan gizi, untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan. Pedoman ini menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan untuk memantau kondisi pangan dan gizi, serta menyediakan informasi kondisi pangan dan gizi. Dengan adanya standar pemantauan hal ini tentu mempermudah dalam penilaian kondisi pangan dan gizi mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Penerimaan kebijakan untuk dijalankan oleh pemerintah sebagai pelaku kebijakan tercermin dari kemauan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan agar kebijakan tersebut mencapai tujuannya. Para

pelaku SKPG di Kabupaten Bantul telah memahami perlunya pelaksanaan SKPG untuk memantau kondisi pangan dan gizi mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Informasi pangan dan gizi sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan maupun program, sehingga kejadian rawan pangan dapat dihindari. Pemahaman ini terlihat dari keterlibatan berbagai pihak dan komitmen dalam proses pelaksanaan SKPG.

Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjalankan SKPG juga terlihat dari adanya BKPPP yang menjadi leading sector dalam pelaksanaan SKPG. Dengan adanya leading sector, pihak yang menjadi penanggungjawab terlaksananya SKPG menjadi jelas dan terkoordinir. Hal ini menghindari terjadinya tarik ulur tugas dan pertanggungjawaban sehingga memudahkan dalam pelaksanaan SKPG.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Permentan No. 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan kebijakan yang bersifat teknis untuk mengatur monitoring kondisi pangan dan gizi. Kebijakan ini mengatur standar dari pelaksanaan SKPG, sehingga SKPG siap dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. SKPG merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi untuk memantau kondisi pangan dan gizi. Pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul berpedoman pada Permentan tersebut.

Tujuan utama dari pelaksanaan SKPG ialah tersedianya informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan, untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul telah efektif dalam menyediakan informasi pangan dan gizi di Kabupaten Bantul. Kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Bantul cenderung aman. Hanya terdapat enam desa yang mengalami rawan pangan pada tahun 2013. Akan tetapi

penyebaran informasi situasi pangan dan gizi masih sangat terbatas pada SKPD yang berpartisipasi langsung pada kegiatan SKPG. Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya pemanfaatan informasi pangan dan gizi yang dihasilkan SKPG untuk mengantisipasi secara lebih menyeluruh kejadian rawan pangan Efektivitas pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul dalam hal ini diukur dengan menggunakan lima indikator yakni tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang telah peneliti lakukan, maka direkomendasikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah pelaksana kebijakan.

1. Perlunya kejelasan indikator dalam menilai kondisi kerawanan pangan dan gizi, khususnya indikator ketersediaan pangan. Sehingga ketiga indikator tersebut dapat berlaku adil dan menggambarkan kondisi rawan pangan dan gizi sesuai dengan fakta di lapangan.
2. Perlunya penambahan kuantitas anggota dalam Pokja SKPG di Kabupaten Bantul, agar kegiatan SKPG di Kabupaten Bantul dapat lebih maksimal.
3. Pemerintah hendaknya mengalokasikan dana yang cukup untuk pelaksanaan SKPG. Sehingga SKPG dapat dilaksanakan sesuai dengan Pedoman SKPG yang telah diterbitkan.
4. Perlunya penambahan intensitas koordinasi, mengingat rawan pangan dan gizi dapat terjadi tanpa bisa diprediksi. Selain itu intensitas koordinasi juga akan meningkatkan pemantauan kondisi rawan pangan dan gizi.
5. Perlunya sosialisasi SKPG ke setiap sektor SKPD di Kabupaten Bantul, untuk menambah dukungan dalam pelaksanaan SKPG, berkaitan dengan informasi yang berpengaruh terhadap rawan pangan dan gizi maupun intervensi untuk mencegah atau menanggulangi rawan pangan dan gizi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten dan Kota. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- _____. 2010. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan.
- _____. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Jakarta: Kementerian Pertanian
- _____. 2012. Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2012. Bantul: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.
- _____. 2012. Laporan Subbidang Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi. Bantul: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.
- _____. 1988. Guidelines for the Development of A Food and Nutrition Surveillance System for Countries in the Eastern Mediterranean Region. Pakistan: WHO
- Azam Awang. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad Suryana. 2003. Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. Yogyakarta: BPFE.
- Dwi Harsono, dkk. 2013. Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul (Studi Kasus di desa Bawuran, Kecamatan Pleret dan Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu). Penelitian Melibatkan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Terjemahan Samodra Wibawa, dkk). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edi Suharto. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Paduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- G. Simon Devung. 1988. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Direktorat Jendral pendidikan tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/10/01/mtzdk-ketahanan-pangan-indonesia-berada-di-zona-merah>, diakses pada 16/12/2013-11.15 WIB.

<http://www.kr.co.id/bantul-siaga-darurat-bencana>, diakses 24 Februari 2014 pukul 09.19 WIB

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nuflil Hanani AR. 2009. Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota. www.nuflil.lecture.ub.ac.id/doc, diakses tanggal 24 Februari 2014 pukul 11.03 WIB.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

Peraturan Menteri Pertanian No. 48 Tahun 2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Riant Nugroho. 2012. Public Policy. Jakarta: PT. Media Komputindo.

Shoham, J. Foina Watson & Carmel Dolan. 2001. The Use of Nutritional Indicators in Surveillance System. Paper Overseas Development Institute.

Soewarno Handayani. 1990. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: PT Dharma Karsa Utama.

Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suhardjo. 2005. Perencanaan Pangan dan Gizi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tambunan, Tulus. 2008. Ketahanan Pangan di Indonesia: Mengidentifikasi Beberapa Penyebab. www.kadin-indonesia.or.id/pdf diakses tanggal 24 Februari pukul 11.27 WIB.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Yusuf Reynald G.L. 2006. Analisis Kinerja Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.